

PENGARUH PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DIBAPENDA KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2018-2022

¹ Fuji Nurlaela, ² Euis Hernawati

^{1,2} Program Studi Administrasi Keuangan

^{1,2} Politeknik Piksi Ganesha, Jl. Jend. Gatot Soebroto No.301 Bandung.

[1nurlaelafuji@gmail.com](mailto:nurlaelafuji@gmail.com); [2euishernawati68@gmail.com](mailto:euishernawati68@gmail.com)

ABSTRACT

This research aims to find out the influence of surface water tax on local revenue in Bapenda in Sukabumi I Regency for the 2018-2022 period. The method used in this research is descriptive quantitative by collecting data from field studies, library and website studies. The sample used in this research is data on surface water tax revenues and local original income revenues in 2018-2022. Based on the research results, it can be found that the results of surface water tax revenues and local original income have a very strong relationship, with local original income of 0.030 and an influence of 83.5% while the remaining 16.5% is influenced by other variables outside this regression equation or variables not studied. The results of the research show that the tax collection process has been carried out well, but there are still obstacles experienced in the collection process, namely the lack of knowledge of taxpayers regarding the surface water tax payment process, the existence of arrears in tax payments. The efforts made to overcome these obstacles are by following developments in social media, and holding a tax whitening program every year, to make it easier to pay off arrears.

Keywords: Surface Water Tax, Original Regional Income, Influence

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah dibapenda dikabupaten sukabumi I periode 2018-2022. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data studi lapangan, studi pustaka dan website, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak air permukaan dan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2018-2022. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat ditemukan bahwa hasil penerimaan pajak air permukaan dan penerimaan pendapatan asli daerah mempunyai hubungan sangat kuat, dengan pendapatan asli daerah sebesar 0,030 dan berpengaruh sebesar 83,5% sedangkan sisanya 16,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Hasil penelitian menunjukkan dalam proses pemungutan sudah dilakukan dengan baik namun masih terdapat hambatan yang dialami dalam proses pemungutan yaitu kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap proses pembayaran pajak air permukaan, adanya tunggakan dalam pembayaran pajak. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan mengikuti perkembangan media sosial, dan mengadakan program pemutihan pajak pada setiap tahun nya, untuk meringankan dalam melunasi tunggakan.

Kata Kunci : Pajak Air Permukaan, Pendapatan Asli Daerah, Pengaruh

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Undang-undang 1945. Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem pemungutan pajak. Pajak yaitu sumber utama yang sudah ditetapkan pemerintah dalam menambah pendapatan negara secara langsung ataupun tidak langsung. Adanya pemanfaatan dari kekayaan sumber daya alam yang memiliki potensi ekonomi di tiap daerah yang dapat berguna untuk membangun daerah tersebut.

Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan suatu daerah maka diadakan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Abdul Halim (2007 : 96) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Dalam membiayai suatu pembangunan, salah satu upaya dalam menyerap dana dari pendapatan asli daerah, yang terdiri dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah (Rombang, 2013:34). Dari hasil pendapatan asli daerah yang sah, yang bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan pendapatan asli daerah dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, semakin tinggi pendapatan asli daerah maka akan semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam membiayai kebutuhan daerah dan membuktikan pemerintah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah, jika pendapatan asli daerah semakin sedikit dan akan mengalami penurunan dengan sebab itu penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, berdasarkan pemungutan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Salah satu penerimaan pajak yang ada di Bapenda Kabupaten Sukabumi I ialah pajak air permukaan. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan

Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 akan tetapi pada saat Undang-undang PDRD disahkan, PPPAB dibagi menjadi menjadi dua pajak air permukaan sebagai pajak provinsi dan pajak air bawah tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten /kota. Pajak air permukaan adalah pajak atas pemanfaatan atau pengambilan air permukaan termasuk air laut yang dilaut maupun yang di daratan untuk kepentingan pribadi dan lembaga sedangkan untuk objek pemungutan pajak ialah segala bentuk pemanfaatan yang berhubungan dengan air permukaan serta yang dikecualikan, subjek pajak ialah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perkebunan dan kehutanan masyarakat yang harus tetap mempertahankan kelestarian lingkungan, pemanfaatan air permukaan yang dikhususkan untuk eksploitasi dan pemeliharaan lingkungan.

Pajak air permukaan termasuk kedalam 5 jenis pajak yang menjadi wewenang pemerintah provinsi, akan tetapi pajak air permukaan tidak mutlak ada pada seluruh daerah dikarenakan pengenaan pajak daerah tergantung pada keputusan pemerintah daerah.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi faktor yang sangat menghambat dan kebiasaan seperti ini akan sulit untuk diubah secara instan. Dengan begitu pemerintah harus lebih berbenah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan upaya meningkatkan pemungutan pajak air permukaan agar lebih optimal dalam pengelolaan keuangannya demi memakmuran dan kenyamanan masyarakat. Sulitnya mengidentifikasi pembayaran pajak yang potensial dikarenakan tidak semua wajib pajak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak karena kurangnya kemudahan dalam proses pembayaran pajak akan terhambat. Dilihat dari peran pajak air permukaan yang sangat besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah maka sebaliknya upaya yang dilakukan harus lebih optimal salah satunya dengan cara mempermudah dalam proses pembayaran dengan pemahaman

yang dapat dipahami oleh wajib pajak bagaimana proses pembayaran pajak tersebut. Menurut Waluyo (2011:20) pemahaman wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak.

Tujuan penelitian yaitu (1) untuk mengetahui perkembangan pajak air permukaan di Bapenda Kabupaten Sukabumi I periode tahun 2018-2022; (2) untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli daerah di Bapenda Kabupaten Sukabumi I periode tahun 2018-2022; (3) untuk mengetahui pengaruh pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah di Bapenda Kabupaten Sukabumi I periode tahun 2018-2022; (4) untuk mengetahui hambatan yang berkaitan dengan pajak air permukaan dan pendapatan asli daerah di Bapenda kabupaten Sukabumi periode tahun 2018-2022; (5) untuk mengetahui upaya dalam menangani hambatan yang dilakukan dalam menangani hambatan tersebut.

METODE

Pada dasarnya metodologi penelitian adalah sebuah ilmu untuk mempelajari langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan sebuah penelitian, dengan begitu dapat kita pelajari secara mendalam sehingga diperoleh bukan hanya pengetahuan tentang penelitian, tetapi juga kemahiran dalam melaksanakannya. Tipe penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan melakukan uji analisis dengan mengumpulkan data-data kemudian menginterpretasikan pada hasilnya dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai suatu tujuan. Sugiyono (2012:13) menyatakan metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian dilaksanakan di Bapenda Kabupaten Sukabumi I dengan rentang waktu Maret sampai Mei 2023. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak air permukaan dan data penerimaan pendapatan asli daerah di

Bapenda Kabupaten Sukabumi I pada tahun 2018 sampai 2022.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Analisis uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan nilai signifikansi $> 0,005$ apabila data berdistribusi normal dan $<$ data tidak berdistribusi normal; (2) Analisis koefisien determinasi (r^2) koefisien penentu karena variasi variabel X dan dijelaskan memalui variasi variabel Y;

Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi :

(3) Analisis koefisien korelasi yaitu untuk mencari hubungan variabel X dan Y dan mengukur arah hubungan kedua variabel tersebut;

(4) Analisis regresi linier sederhana untuk membuat suatu keputusan antara naik dan menurunnya variabel dependen dan dapat dilakukan peningkatan melalui variabel independen ataupun tidak; (5) Analisis uji T-Test dasar pengambilan suatu keputusan dalam uji t parsial. Dan memiliki dua acuan yang dapat dipakai ialah (1) berdasarkan nilai signifikansi; (2) Perbandingan nilai T_{hitung} dan T_{tabel} .

HASIL DAN PEMBAHASAN

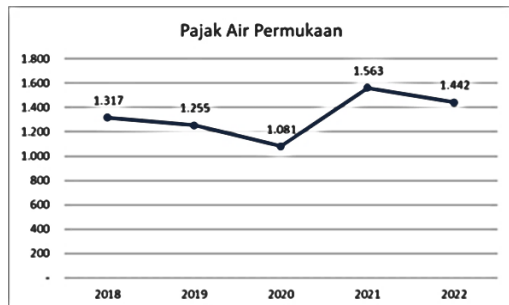
Perkembangan Pajak Air Permukaan di Bapenda Kabupaten Sukabumi I periode tahun 2018-2022 :

Tabel 1. Perkembangan Pajak Air Permukaan di Bapenda Kabupaten Sukabumi periode Tahun 2018-2022 (dalam jutaan)

Tahun	Realisasi	Perkembangan		keterangan
		Rp.	%	
2018	1.317	-	-	-
2019	1.255	(61)	(5)	Turun
2020	1.081	(174)	(14)	Turun
2021	1.563	481	45	Naik
2022	1.442	(120)	(8)	Turun
Rata-Rata	1.331			

Sumber : Data Pendapatan PAP Bapenda Kab.sukabumi I (diolah oleh penulis 2023)

Gambar 1. Grafik Perkembangan Pendapatan jumlah Pajak air permukaan di Bapenda Kabupaten Sukabumi 1 periode tahun 2018-2022.



Sumber : Data diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan tabel 1 dan gambar 1 dapat kita lihat perkembangan pendapatan jumlah Pajak air permukaan periode 2018-2022 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah (PAP) sebesar Rp.1.317.100.300. Pada tahun 2019 jumlah (PAP) sebesar Rp.1.255.792.000 mengalami penurunan sebesar Rp.-61.308.300 presentase 5%. Pada tahun 2020 jumlah (PAP) sebesar Rp.1.081.052.300 mengalami penurunan Rp.-174.739.700 dengan presentase 14%. Pada tahun 2021 jumlah (PAP) sebesar Rp.1.563.011.700 mengalami kenaikan Rp.481.959.400 dengan presentase 45%. Pada tahun 2022 jumlah (PAP) sebesar Rp.1.44.936.200 mengalami penurunan Rp. 120.075.500 dengan presentase 8%. Total jumlah PAP paling tinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp.1.563.011.700.

Tabel 2 . Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Bapenda Kabupaten Sukabumi I periode tahun 2018-2022 (dalam ratusan juta)

Tahun	Realisasi	Perkembangan		keterangan
		Rp	%	
2018	4.959	-	-	2018
2019	3.381	(1.578	(32)	2019
2020	2.686	(6.950	(21)	2020
2021	5.337	2.650	99	2021
2022	5.103	(2.333	(4)	2022
Rata-Rata	4.293			Rata-Rata

Sumber: Data pendapatan asli daerah di Bapenda Kab.sukabumi I(diolah oleh penulis 2023)

Gambar 2. Grafik Perkembangan Pendapatan jumlah Pajak air permukaan di Bapenda Kabupaten Sukabumi 1 periode tahun 2018-2022.



Sumber: Data diolah oleh penulis (2023)

Dari tabel diatas dapat kita lihat perkembangan pendapatan asli daerah periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 jumlah (PAD) sebesar Rp. 495.971.812.453. Pada tahun 2019 jumlah (PAD) sebesar Rp.338.135.562.653 mengalami penurunan Rp.-157.836.249.800 dengan presentase -32%. Pada tahun 2020 jumlah (PAD) sebesar Rp. 268.629.344.700 mengalami penurunan Rp.-69.506.217.953 dengan presentase -21%. Pada tahun 2021 jumlah (PAD) sebesar Rp.533.722.871.772 mengalami kenaikan Rp.265.093.527.072 dengan presentase 99%. Pada tahun 2022 jumlah (PAD) sebesar Rp.510.386.913.241 mengalami penurunan Rp.-23.335.958.531 dengan presentase -4%. Total jumlah PAD paling tinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp.533.722.871.772.

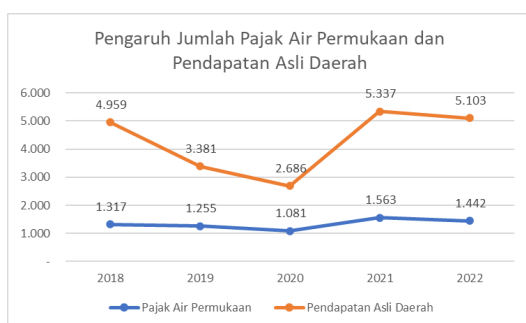
Tabel 3. Jumlah Pajak Air Permukaan dan Pendapatan Asli Daerah di Bapenda Kabupaten Sukabumi I periode tahun 2018-2022

Tahun	Pajak Air Permukaan(dalam jutaan)	Pendapatan Asli Daerah (dalam ratusan juta)
2018	1.317	4.959
2019	1.255	3.381
2020	1.081	2.686
2021	1.563	5.337

2022	1.442	5.103
Rata-rata	1.332	4.293

Sumber : diolah oleh penulis 2023

Gambar 3. Grafik Pengaruh jumlah Pajak Air Permukaan dan Pendapatan Asli Daerah di Bapenda Kabupaten Sukabumi I periode tahun 2018-2022



Sumber : diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan tabel 3 dan gambar 3, maka penulis dapat mengetahui bahwa meningkat dan menurunnya Pendapatan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Bapenda Kabupaten Sukabumi. Tahun 2021 pendapatan pajak air meningkat dan pendapatan asli daerah meningkat hal ini disebabkan karena bertambahnya dan rutinya petugas untuk melakukan sosialisasi ke daerah yang mempunyai potensi air permukaan. Tahun 2019 pendapatan pajak air menurun dan tahun 2022 Pendapatan asli daerah menurun ketidak tercapaiannya pendapatan, karena adanya hambatan atau permasalahan pemungutan yang belum efektif diantaranya yaitu adanya wajib pajak yang telah menggunakan air permukaan namun belum mendapatkan izin dari BPSDA (Balai Pengelolaan Sumber Daya Air), dan curangnya wajib pajak yang tidak melapor kepada dinas bahwa perusahaan tersebut telah menggunakan air, karena terhalangnya dengan aturan yang dimana Dispenda ini dapat memungut pajak air permukaan atas keputusan dari BPSDA yang mengeluarkan NPA(Nilai perolehan Air),hal ini akan mempengaruhi besarnya potensi pajak yang terdaftar untuk meningkatkan penerimaan pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

		Pajak Air Permukaan	Pendapatan Asli Daerah
N		5	5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	133197850	42936930096
	Std. Deviation	0,00	3,80
	Skewness	183492269,	11837476961
Most Extreme Differences	Positive	,139	,313
	Negative	-,139	-,313
Test Statistic		,139	,313
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}	,123 ^c

Sumber :Diolah oleh penulis menggunakan SPSS versi 26

Berdasarkan tabel 4 menggunakan hasil uji normalitas one sample kolomogorov-smirnov dapat diketahui bahwa nilai sig. Pajak Air Permukaan 0,200 dan nilai sig. Pendapatan Asli Daerah 0,123. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sig. Pajak Air Permukaan > 0,05 atau 0,200 > 0,5 dan nilai sig. Pendapatan Asli Daerah atau 0,200 > 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil uji normalitas dari Pajak Air Permukaan dan Pendapatan Asli Daerah berdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,914 ^a	,835	,780	55523520828,746

Sumber :Diolah oleh penulis menggunakan SPSS versi 26

Berdasarkan tabel 4 Berdasarkan tabel output model Summary diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi yaitu sebesar 0,914 artinya korelasi antara pajak air permukaan dengan pendapatan asli berada pada kategori sangat kuat. Nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai sebesar 0,835.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah 83,5% sedangkan sisanya 16,5 % (100%-83,5%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

Tabel 6. Hasil Analisis Koefisien Korelasi Pearson Product Moment

		Pajak Air Permukaan	Pendapatan Asli Daerah
Pajak Air Permukaan	Pearson Correlation	1	,914*
	Sig. (2-tailed)		,030
	N	5	5
Pendapatan Asli Daerah	Pearson Correlation	,914*	1
	Sig. (2-tailed)	,030	
	N	5	5

Sumber :Diolah oleh penulis menggunakan SPSS versi 26

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi yaitu sebesar 0,914 artinya korelasi antara pajak air permukaan dengan pendapatan asli berada pada kategori sangat kuat. Nilai sig. 0,030 karena nilai sig (0,030) < 0,05 maka artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pajak air permukaan dengan pendapatan asli daerah.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-	203047		-	,178
	355831	858852,666		1,75	
	149492,442			5,2	
Pajak Air Permukaan	589,499	151,297	,914	3,896	,030

Sumber :Diolah oleh penulis menggunakan SPSS versi 26 (23)

Berdasarkan tabel 7 pada kolom B nilai Constant adalah -355831149. Sedangkan jumlah pajak air permukaan adalah 589,499. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis : $Y = a + bX$ atau $Y = -355831149 + 589,499 X$ dimana Y Pendapatan Asli Daerah dari persamaan regresi diatas dapat disimpulkan kenaikan 1 variabel Pajak Air Permukaan (X) akan berpengaruh sebesar 589,499 terhadap pendapatan asli daerah dan persamaan regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan asli daerah.

Tabel 8. Hasil Uji T-Test

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-	203047		-	,178
	355831	858852,666		1,75	
	149492,442			5,2	
Pajak Air Permukaan	589,499	151,297	,914	3,896	,030

Sumber :Diolah oleh penulis menggunakan SPSS versi 26 (23).

Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien di peroleh nilai signifikansi sebesar 0,030 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak air permukaan(X) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah(Y).

Berdasarkan nilai T : diketahui T_{hitung} sebesar 3,896 > T_{tabel} sebesar 3,182 sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel pajak air permukaan (X) berpengaruh dalam Variabel Pendapatan Asli Daerah (Y).

Hambatan dalam pendapatan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Bapenda Kabupaten Sukabumi I periode tahun 2018-2022, ialah sebagai berikut (1) Pada tahun 2020 Pendapatan

Pajak Air permukaan mengalami penurunan sebesar Rp.174.739.700 dengan presentase 14% salah satu penyebabnya yaitu adanya hambatan pemungutan pajak yang belum efektif seperti, belum mendapatkan izin dari BPSDA dan kurangnya sosialisasi akan pentingnya wajib pajak melakukan pembayaran pajak.(2) Pada tahun 2019 pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp.157.836.249.800 dengan presentase 32% salah satu penyebabnya yaitu pendapatan pajak air permukaan yang mengalami fluktuasi disebabkan banyaknya perusahaan yang menunggak.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ialah (1)Bapenda mempermudah proses prosedur dalam surat perizinan ke BPSDA agar tidak terjadinya tunggakan dan melakukan sosialisasi yang dilakukan mengikuti perkembangan sosial media informasi diplatform media instagram Bapenda Jabar.(2) Dalam menangani hal tersebut Bapenda memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dengan mengadakan pemutihan pajak setiap tahunnya untuk meringankan masyarakat dalam melunasi tunggakan tersebut.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Bapenda Kabupaten Sukabumi I periode tahun 2018-2022. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini ialah (1) Jumlah pendapatan Pajak air permukaan di Bapenda kabupaten Sukabumi I periode tahun 2018-2022 perkembangannya mengalami naik turun di setiap tahun sehingga mempengaruhi pendapatan di Bapenda kabupaten sukabumi I. Jumlah pendapatan Pajak Air Permukaan yang tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan presentase 45% diakibatkan karena bertambahnya dan rutusnya petugas untuk melakukan sosialisasi ke daerah yang mempunyai potensi air permukaan. Sedangkan untuk jumlah pendapatan terendah terjadi di tahun 2019 dengan presentase 5% karena adanya hambatan pemungutan pajak yang belum efektif seperti, belum mendapatkan izin dari BPSDA. Dan rata-rata

jumlah pendapatan Pajak Air Permukaan selama periode tahun 2018-2022 dengan jumlah 1.331. (2) Jumlah Pendapatan Asli Daerah di Bapenda Kabupaten Sukabumi I periode tahun 2018-2022 perkembangannya mengalami fluktuasi yang di sebabkan karena pendapatan pajak air permukaan yang naik turun. Jumlah pendapatan asli daerah tertinggi yaitu pada tahun 2021 dengan presentase 99% karena pendapatan pajak air yang meningkat membuat pendapatan asli daerah mengalami peningkatan Sedangkan untuk pendapatan asli daerah terendah terjadi pada tahun 2022 dengan presentase 4%. Dengan rata-rata jumlah pendapatan asli daerah selama periode 2018-2022 dengan jumlah 4.293. (3) Pengaruh jumlah pendapatan pajak air permukaan dan pendapatan asli daerah di Bapenda Kabupaten Sukabumi I periode tahun 2018-2022 menggunakan SPSS 26.

Hasil analisis koefisien korelasi menunjukkan terdapat hubungan antara pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,914 yang memiliki arti hubungan antara jumlah pajak air permukaan dengan pendapatan asli daerah dengan kategori sangat kuat. Dan pengaruh pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 83,5% sedangkan sisanya 16,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.(4) Kendala yang terjadi antara pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah di Bapenda Kabupaten Sukabumi I karena kurangnya sosialisasi terhadap pentingnya wajib pajak melakukan pembayaran pajak serta, banyaknya tunggakan dikarenakan kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.(5) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala terhadap pajak air permukaan dan pendapatan asli daerah di Bapenda Kabupaten Sukabumi I periode tahun 2018-2022 . Bapenda Kabupaten Sukabumi I akan melakukan sosialisasi secara rutin dengan tujuan agar wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak, sosialisasi akan mengikuti perkembangan sosial media agar mempermudah proses pembayaran.

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan maka penulis menyampaikan beberapa saran bagi instansi, yang mudah-mudahan

bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk kemajuan instansi. Adapun saran-saran yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut (1) Bapenda Kabupaten Sukabumi I dapat meningkatkan inovasi pelayanan dengan sistem aplikasi perpajakan yang dapat menjangkau masyarakat agar dapat lebih mudah dalam pemungutan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat aplikasi untuk pembayaran pajak air permukaan sehingga, pembayaran bisa dilakukan secara online.(2) Bapenda Kabupaten Sukabumi I juga diharapkan agar meningkatkan kualitas pelayanan dan kuantitas SDM. Apabila kuantitas bertambah mempermudah proses survei lapangan sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang akan menunggak pembayaran pajak.(3) Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel dan tahun pengamatan serta mengkaji lebih banyak lagi sumber maupun referensi yang terkait dengan pajak air permukaan dan Pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (2007) Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba empat.

Laporan Pendapatan Pajak Air Permukaan dan Pendapatan Asli Daerah. Mardiasmo (2020) analisis pengaruh pajak kendaraan bermotor (pkb), bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb), pajak air permukaan (pap) dan sumbangan pihak ketiga (sp3) dealer terhadap pendapatan asli daerah.

<https://ejournal.stiepancasetia.ac.id/kindai/article/view/592/411>

Sugiyono (2021) Metodologi Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung : CV Alfabet

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000

Waluyo (2011) Perpajakan Indonesia Buku 1 Jakarta : Salemba empat